



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARWORINI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3. NHK : 282481

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.431.208.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/160 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 521.170.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/160 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 604.670.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/180 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 305.368.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 520.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, YAMAHA N MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 323.930.060**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.300.138.060



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.300.138.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.